

ANALISIS TATA KELOLA BARANG DAN ASET DAERAH MELATIH APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAN ASET DAERAH DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALANG SELATAN

Sarifudin Yusuf¹⁾, Sarwani²⁾

^{1) 2)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: sarifudiny61@gmail.com

ABSTRAK

Barang Milik Daerah (BMD) atau aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sehingga barang milik daerah perlu dikelola secara tertib, akuntabel dan transparan dengan mengedepankan good governance agar dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung prosedur pengelolaan barang milik daerah, pemerintah daerah didukung oleh perangkat perundang-undangan yang secara langsung menjadi acuan dan kekuatan hukum pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu lingkup dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang memiliki sumber daya yang memadai serta mampu dalam pengembangan daerah, tergantung pada cara pengelolaan barang milik daerah. Aplikasi SIMBADA Administrasi Pergudangan adalah sebuah sistem administrasi pergudangan untuk mencatat proses penerimaan barang, proses penyaluran/pengeluaran barang, perhitungan stok barang, dan menampilkan laporan-laporan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aplikasi SIMBADA telah terhubung mulai dari kegiatan penganggaran, kegiatan penatausahaan keuangan daerah, sampai kegiatan pencatatan dan pelaporan. Atas dasar tersebut, penerapan sistem berbasis komputer, memerlukan satu pihak sebagai administrator yang akan menjalankan database, aplikasi (software) dan hardware.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Barang Milik Daerah

Abstract

Regional Property (BMD) or fixed assets owned by the regional government are an inseparable part of the management and accountability of regional finances, so that regional property needs to be managed in an orderly, accountable and transparent manner by prioritizing good governance so that it is optimally utilized in order to support the implementation of government, development and services to the community. To support the procedure for managing regional property, the regional government is supported by a set of laws that directly serve as a reference and legal force for the regional government in managing regional assets. Management of Regional Property is an inseparable part of regional financial management, in accordance with Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Financial Management, that Management of Regional Property is one of the scopes in regional financial management. Management of regional property affects the fate of a region because a region can become a region that has adequate resources and is capable of regional development, depending on how regional property is managed. The SIMBADA Warehouse Administration application is a warehouse

administration system to record the process of receiving goods, the process of distributing/releasing goods, calculating stock of goods, and displaying reports as required in accordance with applicable regulations. The SIMBADA application has been connected starting from budgeting activities, regional financial administration activities, to recording and reporting activities. On this basis, the implementation of a computer-based system requires one party as an administrator who will run the database, applications (software) and hardware.

Keywords: *Policy Analyst, Regional Property*

LATAR BELAKANG

Barang Milik Daerah (BMD) atau aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sehingga barang milik daerah perlu dikelola secara tertib, akuntabel dan transparan dengan mengedepankan good governance agar dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung prosedur pengelolaan barang milik daerah, pemerintah daerah didukung oleh perangkat perundang-undangan yang secara langsung menjadi acuan dan kekuatan hukum pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 tahun 2008 dan selanjutnya diganti dengan PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah. Dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurut Permendagri Nomor 17 tahun 2007, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah antara lain: (1) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; (2) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; (3) barang yang diperoleh

berdasarkan ketentuan undang-undang; atau (4) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu lingkup dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan barang milik daerah berpengaruh terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang memiliki sumber daya yang memadai serta mampu dalam pengembangan daerah, tergantung pada cara pengelolaan barang milik daerah.

Menurut Sholeh dan Rohmatsyah (2010), secara sederhana pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi 3 (tiga) fungsi utama, yaitu: (1) Adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/ pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan (3) pengawasan (monitoring). Ketiga fungsi utama ini ditunjukkan dalam siklus pengelolaan Barang Milik Daerah. Agar ketiga fungsi tersebut tercapai, maka diperlukan strategi yang tepat dalam pengelolaan BMD. Sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai melalui pengelolaan antara lain, (1) terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah baik menyangkut inventarisasi tanah dan atau bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar- menukar, hibah dan ruislag, (2) terciptanya efisiensi dan keefektifan penggunaan aset daerah dalam menunjang kegiatan pembangunan, (3) pengamanan aset

daerah, dan (4) tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai kekayaan (aset) daerah. Meskipun telah didukung dengan perangkat perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dan kekuatan hukum, aset tetap masih merupakan akun yang dikecualikan atau dianggap tidak wajar dalam opini laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini tidak lepas dari banyaknya permasalahan aset yang sering dijumpai pada pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), berbagai permasalahan terhadap akun aset tetap yang biasa terjadi diantaranya adalah karena nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang memadai; saldo aset tetap tidak dapat ditelusuri; aset tetap tidak diketahui keberadaannya; aset tetap dikuasai pihak lain; aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain. Beberapa permasalahan ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat memanfaatkan aset tetapnya tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam menjalankan roda pemerintahan serta berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Aset daerah adalah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus dikelola dengan baik, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah di Indonesia kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Nomor 27 tahun 2014 dalam peraturan pemerintah ini telah diatur bahwa pejabat yang melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Gubernur/Bupati/Walikota adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian sekretaris daerah adalah sebagai pengelola barang, dan kepala satuan perangkat adalah

sebagai Pengguna Barang. Dalam Peraturan ini ditetapkan pengelolaan barang milik daerah meliputi: Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Pemerintah Daerah memiliki hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Namun demikian dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti bahwa Pemerintah Daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Namun pada perkembangannya untuk menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk dapat mengoptimalkan potensi pendapatan pajak dari sektor properti saja, tetapi juga harus mengetahui jumlah dan sejauh mana pemanfaatan aset properti yang dimiliki Pemerintah Daerah saat ini. Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang berkualitas.

Aplikasi SIMBADA Administrasi Pergudangan adalah sebuah sistem administrasi pergudangan untuk mencatat proses penerimaan barang, proses penyaluran/pengeluaran barang, perhitungan stok barang, dan menampilkan laporan-laporan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam menjalankan aplikasi SMBADA, ada beberapa permasalahan yang peneliti temukan terkait pengelolaan peralatan aset dan barang pada UPT PPD Malang Selatan yaitu masih kurangnya data riil yang ada karena pengurus barang tersebut kurang aktif dalam melakukan inventarisasi serta tidak jeli dalam pengamanan aset, secara efektif karena kurang

pahaminya pengurus barang untuk menginput ke dalam aplikasi tersebut. Selain itu belum maksimalnya pengurus Barang menguasai fungsi- fungsi pada aplikasi baik dikarenakan adanya fungsi yang belum dijalankan seperti fungsi penginputan, kurangnya pemahaman pengguna layanan ataupun adanya fungsi data pada aplikasi yang belum dikelola dengan baik seperti fungsi penyusutan dan fungsi generate kode barang.

Dengan adanya permasalahan yang terjadi didalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah hendaknya melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pelaporan aset/barang milik daerah yang sering terjadi masalah dalam pelaporannya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan judul yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu “Analisis Tata Kelola Barang Dan Aset Daerah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah Di Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Malang Selatan”.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Dye (1992:2) mengartikan kebijakan publik sebagai “whatever governments choose to do or not to do”. Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pendapat senada dikemukakan oleh Edward III dan Sharkansky dalam Islamy (1984: 18), yang mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah “what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs.” Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan.

Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Kartasmita (1997:142) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau yang memengaruhinya, dan (3) apa pengaruh dan

dampak dari kebijakan publik tersebut.

Anderson dalam Islamy (1994: 19) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Friedrich dalam Wahab (1991:13) mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Stakeholders disebut juga sebagai “policy actors” atau “political actors”. Mustopadijaja (1992) menambah satu elemen, yaitu kelompok sasaran kebijakan (target groups). Sementara menurut David Easton sistem terdiri atas unsur inputs, process, outputs, feedback, dan lingkungan. Lingkungan kebijakan dibagi dalam dua macam, yaitu intra dan extra societalenvironment. Dalam lingkungan ini mengalir dua inputs yaitu demands/claims dan supports yang kemudian diproses ke dalam sistem politik yang selanjutnya melahirkan policy outputs, berupa policy dan decision. Policy outputs kembali ke social environment sebagai respons (feedbacks) terhadap demands/ claims dari social environment (Subarsono, 2006:13)

Kebijakan publik merupakan ilmu yang relatif baru muncul pada masa pertengahan tahun 1960 yang mana sebagai sebuah disiplin yang menonjol dalam lingkup administrasi publik maupun ilmu politik. Sementara itu kebijakan publik bisa dibilang telah lama eksis sejak adanya peradaban manusia. Sejak itu kebijakan publik tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bentuk tataran mikro individual maupun konteks tataran makro dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kebijakan publik mengatur, mengarahkan dan mengembangkan interaksi dalam komunitas dan antara komunitas dengan

lingkungannya untuk kepentingan agar komunitas tersebut dapat memperoleh atau mencapai kebaikan yang diharapkannya secara efektif.

Jenis-jenis Kebijakan Publik

Pendekatan utama dalam tipologi kebijakan publik adalah pada latar belakang maksud, proses operasi, isu dan klien dari kebijakan yang bersangkutan (Lowi, 1964). Menurutny, kebijakan publik dapat bersifat distributif, regulatif, dan redistributif. Klasifikasi ini telah mendapatkan popularitas dalam literatur administrasi publik tentang kebijakan publik (Olaniyi, 1998; Chandler & Plano, 1988; Okeke, 2001). Namun, Olaniyi (1998) menambahkan jenis keempat sebagai kebijakan konstituen. Dari Obamwonyi dan Aibieyi (2014), bentuk lainnya dapat dilihat sebagai kebijakan ekstraktif dan kebijakan simbolik. Penjelasan singkat mengenai jenis-jenis kebijakan publik ini diperlukan.

1. Kebijakan distributif: Kebijakan-kebijakan ini berkaitan dengan tarif atau pajak, lahan publik, alokasi fasilitas publik, dan sebagainya (Obikeze & Anthony, 2004). Kebijakan-kebijakan semacam ini memerlukan pembagian atau alokasi tambahan dalam unit per unit ke berbagai sektor ekonomi serta individu dan institusi.
2. Kebijakan distributif: Dalam jenis kebijakan ini, ada transfer manfaat dari satu orang, sektor atau institusi ke orang lain. Fakta bahwa suatu zona atau individu mendapat manfaat, merupakan ancaman bagi orang lain yang menikmati sumber daya secara penuh atau tidak sama sekali. Kebijakan-kebijakan ini merupakan langkah pemerataan pemerintah dalam bentuk kerangka hukum untuk mengurangi ketidaksetaraan dan keluhan marjinalisasi.
3. Kebijakan peraturan: Kebijakan-kebijakan ini melibatkan penetapan standar dan aturan untuk membatasi kegiatan beberapa kelompok dalam masyarakat untuk mencegah konsekuensi

yang tidak diinginkan dari tindakan atau kelambanan mereka (Egonmwan, 1991).

4. Kebijakan ekstraktif: Kebijakan-kebijakan ini dibuat untuk mengekstraksi sumber daya seperti uang, barang dan jasa, orang-orang dari lingkungan domestik dan internasional. Melihat kebijakan hanya sebagai kebijakan distributif/redistributif dan regulasi sangatlah terbatas. Pemerintah ada untuk menciptakan peluang bagi produksi barang dan jasa untuk menawarkan solusi bagi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.
5. Kebijakan simbolis: Beberapa kebijakan dan program dibuat untuk mempromosikan perilaku atau tindakan tertentu. Hal ini dilakukan dalam bentuk pemberian penghargaan untuk menunjukkan sikap tertentu. Seperti namanya, kebijakan ini memiliki tujuan simbolis. Hal tersebut merupakan dorongan bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan yang diinginkan dan sering kali untuk membangun rasa kebersamaan dan identitas bersama atau untuk merayakan karakter yang patut diteladani (Obamwonyi & Aibieyi, 2014).

Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen merupakan gabungan dari perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware) dan sumber daya manusia (SDM) yang saling berkaitan dalam mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat melalui penciptaan sebuah sistem. Selain penggunaan komputer, manusia juga turut menjadi bagian dari sistem ini. Manusia menggunakan sebuah ide, pemikiran dan perhitungan dalam menggunakan komputer yang didalamnya terdapat software dan hardware. Selain itu terdapat pula process perencanaan, kontrol, koordinasi dan pengambilan keputusan.

Evaluasi Sistem Informasi Manajemen

Evaluasi sistem informasi manajemen

adalah suatu kegiatan terencana yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai sumber daya dalam organisasi atau lembaga untuk mendapatkan hasil yang nantinya akan dibandingkan dengan menggunakan tolok ukur tertentu untuk memperoleh hasil mengenai kinerja sumber daya organisasi tersebut. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan - harapan yang ingin diperoleh.

Evaluasi SIM adalah mendefinisikan seberapa baik SIM dapat beroperasi pada organisasi yang menerapkannya untuk memperbaiki prestasi dimasa mendatang. Evaluasi SIM dapat dilakukan dengan cara berbeda- beda tergantung dari tujuan evaluasi. Sehingga dapat dikatakan evaluasi SIM merupakan sebuah penilaian terhadap Sistem Informasi Manajemen.

Perspektif Pengelolaan Barang Milik Daerah

Barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yaitu meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah adalah barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, BMD menjadi salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dikelola dengan akuntabel, efektif, efisien, serta ekonomis.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, masing-masing

daerah diberikan kesempatan dalam mengelola, mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai potensi dan kebutuhan yang ada. Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah terkait penyediaan BMD yang digunakan untuk pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Aset

Pengelolaan aset negara/daerah dalam pengertian yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 06 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administrative semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan aset.

Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara/daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas.

Manajemen Aset

Tujuan dan sasaran dari manajemen aset adalah untuk mencapai kecocokan/ kesesuaian sebaik mungkin antara keberadaan aset dengan strategi entitas (organisasi) secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup seluruh siklus hingga aset sejak perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengaturan risiko dan biaya yang terkait selama siklus hidup aset.

METODE

Jenis Penelitian

Metode Penelitian Kualitatif Adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis

mendalam (in-depth analysis), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Spradley dalam buku Sugiyono (2016) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi social.

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah, dimana rumusan masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan masalah penelitian di lapangan. Sifat pendekatan kualitatif yang lentur, yang mengikuti pola pikir yang empirical induktif, dimana segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk pengambilan data- data seputar penelitian. Lokasi penelitian mejadi penting untuk dilakukan observasi dikarenakan peneliti akan mencari segala kebutuhan yang diperlukan seperti data, informasi, narasumber dan temuan-temuan lainnya. Agar memperoleh data yang akurat atau mendekati kebenaran sesuai dengan fokus penelitian, maka peneliti memilih dan menetapkan lokasi penelitian di Di Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Malang Selatan.

Informan Penelitian

Informan penelitian yang dimaksud adalah narasumber yang sangat memahami kajian penelitian yang nantinya narasumber tersebut akan dijadikan sebagai informan atau key informan dalam penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti melibatkan beberapa subyek yang akan dijadikan sebagai informan penelitian yang memberikan informasi

mengenai permasalahan dalam penelitian.

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Aries Yudhanata	KA. UPT-PPD	1
2	Enro Dwijaya	KA Sub Tata Usaha	1
3	Hendro Rudiyanto	KA. Seksi Penagihan dan Pembayaran	1
4	Andreas Adi Widodo	KA. Seksi Pendataan dan Penetapan	1
5	Ibnu Sujono	Pengelola Data Perpajakan Kb. Samsat Talangagung	1

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data- data penelitian adalah observer partisipatory atau pengamatan terlibat. Selain itu untuk memperoleh data dan informasi secara detail maka ada beberapa langkah guna mempermudah peneliti dalam mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Proses Getting In (Memasuki Dasar Penelitian)

Pada proses ini diawali dengan pengenalan kepada informan kunci sebagai orang yang akan melakukan penelitian. Pada tahap ini peneliti memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan maksud dari kedatangan peneliti di lokasi penelitian. Setelah proses perkenalan maka akan dilanjutkan dengan wawancara kepada key informan atau narasumber.

Dalam penelitian ini prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data- data penelitian adalah studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Studi Kepustakaan, yaitu proses pengumpulan data mengenai teori- teori yang digunakan sebagai acuan dasar dalam menganalisa apa saja permasalahan dengan menggunakan buku-buku dari beberapa

ahli. Selain itu peneliti juga akan menjadikan referensi jurnal dan website sebagai salah satu komponen pendukung.

2. Studi Lapangan, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan langsung ke lokasi yaitu uti proses wawancara, entasi, dan observasi.
3. Wawancara, pada tahap ini penulis akan kan beberapa pertanyaan yang dibutuhkan kepada narasumber seputar fokus penelitian, tujuan penelitian sehingga hasil yang didapatkan bisa secara maksimal dan mampu memperoleh data yang dibutuhkan.
4. Observasi, Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati keadaan lokasi yang dituju untuk mencari data yang terlihat dari kegiatan
5. Dokumentasi, pada bagian ini penulis akan mengumpulkan dokumen atau berkas yang didapat dari lokasi penelitian maupun dari narasumber sebagai bahan untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Dokumentasi biasa berupa gambar penelitian pelaksanaan kegiatan suatu program dan data pendukung.

Hasil dari dokumentasi ini diharapkan mampu menjadi salah satu data pendukung dalam keaslian bukti penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik atau prosedur analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu analisa data yang dilakukan pada teknik pengolahan data seperti pengecekan data dan tabulasi. Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode Grounded Theory yaitu pengendalian yang mendalam dengan menganalisis data secara sistematis dan intensif dengan tujuan menemukan teori, hipotesis, dan proposisi secara langsung dari data. Hal semacam ini juga dilakukan dengan membaca uraian data, informasi grafik atau diagram, kemudian diuraikan. Proses analisa data yaitu dimulai dari pengumpulan data-data yang diperoleh, kemudian refusing data atau pemilihan dan pemilahan data yang akurat, kemudian diuraikan berdasarkan permasalahan

yang terjadi sambil terus mencari penemuan-penemuan guna mempertegas data penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Analisis Tata Kelola Barang dan Aset Daerah Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah Di Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Malang Selatan

Hasil Penelitian

SIMBADA merupakan suatu sistem administrasi barang berlandaskan inovasi teknologi yang dapat meringankan pemerintah daerah dalam menciptakan data barang yang aplikatif, likuid, tepat, komplit dan bisa dikonfirmasi. SIMBADA sebagai aplikasi yang dibuat untuk memacu jalannya perubahan administrasi barang daerah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pegawai pemerintah daerah yang berlatar belakang administrasi, dan pemerintah sekitar yang berjuang untuk menggabungkan pelaporan barang sesuai dengan peraturan dan kebijakan terkait.

Penerapan SIMBADA adalah suatu program yang dibuat dengan menggunakan pendataan. Aplikasi SIMBADA telah terhubung mulai dari kapasitas perencanaan, fungsi penatausahaan pemerintahan daerah hingga kemampuan akuntansi dan perincian. Jadi dalam setiap pelaksanaan sistem berbasis PC, penting untuk menyebutkan pihak yang bertindak sebagai pengawas. Pimpinan memiliki kapasitas untuk mengawasi basis informasi, mengawasi aplikasi (pemrograman) dan peralatan pada masing-masing SKPD yang dipimpinnya adalah pengguna anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai user terakhir dari aplikasi SIMABADA (Indonesia, hal. 3).

Laporan barang yang dibuat dari aplikasi SIMBADA sebagian besar digunakan untuk melihat pengakuan pendapatan, penggunaan, pemindahan, dan dukungan dengan rencana pengeluaran yang telah

ditentukan sebelumnya, survei keadaan barang, menilai kelayakan dan kemampuan bahan pengungkapan, dan membantu dengan memutuskan konsistensinya dengan peraturan dan pedoman.

Penggunaan SIMBADA Pada UPT PPD Malang Selatan

Aplikasi SIMBADA Administrasi Pergudangan adalah sebuah sistem administrasi pergudangan untuk mencatat proses penerimaan barang, proses penyaluran/pengeluaran barang, perhitungan stok barang, dan menampilkan laporan-laporan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam perhitungan persediaan, aplikasi ini menggunakan metode FIFO dalam pengeluaran barang dari gudang dan dinilai dengan harga perolehan barang pada saat pembelian/penerimaan.

Aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan agar aplikasi SIMBADA dapat berjalan adalah sebagai berikut.

- 1) Ms. SQL Server 2000
Aplikasi database yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data-data aplikasi SIMBADA.
- 2) Borland Database Engine
Sebagai konektifitas antara Aplikasi Simbada dengan Database pada Ms. SQL Server 2000.
- 3) SQL Native Client (optional)
Sebagai konektifitas tambahan antara Aplikasi Simbada dengan Database pada Ms. SQL Server 2000. SQL Native Client Driver ini tidak harus diinstal, hanya sebagai alternatif konektifitas yang lebih cepat daripada driver yang sudah ada (SQL Server).

Aplikasi SIMBADA telah terhubung mulai dari kegiatan penganggaran, kegiatan penatausahaan barang daerah, sampai kegiatan pencatatan dan pelaporan. Atas dasar tersebut, penerapan sistem berbasis komputer, memerlukan satu pihak sebagai administrator yang akan menjalankan database, aplikasi (software) dan hardware.

Faktor Yang Mempengaruhi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberlangsungan tata kelola aplikasi SIMBADA baik faktor yang mendukung maupun faktor penghambat yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

Keberadaan aplikasi SIMBADA sangat menguntungkan dalam upaya pengelolaan barang dan aset daerah. Dengan adanya aplikasi ini akan mempermudah kinerja pegawai untuk mengelola dan mengatur manajemen barang dan aset daerah. Selain itu aplikasi SIMBADA juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor yang menghambat yaitu masih minimnya sumberdaya manusia yang mampu menjalankan aplikasi SIMBADA. Kemudian hambatan lainnya yaitu SIMBADA cukup terhambat dengan jaringan yang kadang error.

Berikut ini adalah matriks yang peneliti sampaikan beserta dengan solusi dan saran untuk pengembangan aplikasi SIMBADA :

Tabel 2 Matriks Pemecahan Masalah Kriteria keputusan yang n untuk menyarankan an masalah kebijakan Dunn

No	Hambatan SIMBADA	Solusi dan Pemecahan	Saran Untuk Pengembang Aplikasi SIMBADA
1	Sumber Daya Manusia	Dilaksanakan Bimtek seputar SIMBADA	Pembekalan dan kesadaran tentang tugas pokok dan inti
2	Jaringan	Memakai Jaringan Intranet	Telah dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan menggunakan jaringan Intranet

Gambar 1 Tampilan SIMBADA

3	Perangkat Lunak	Pendistribusian Perangkat Lunak yakni computer yang sesuai dengan kapasitas yang diperlukan	Segera dilakukan pendistribusian perangkat lunak ke setiap petugas pengumpul data Aplikasi SIMBADA
---	-----------------	---	--

Pembahasan

Analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan (William N. Dunn, 2000).

Kebijakan publik adalah “a complex pattern of interdependent collective choice, including decisions not act, made goverenmental bodies and official. Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. (Dunn, 2004).

Konsep yang lebih modern yaitu satisfactory dan sufficiency. (Simon dalam Nugroho, 2012). Disini pengambilan alternatif terbaik maksimal, namun alternatif yang terbukti akan menghasilkan suatu kenaikan manfaat yang paling memuaskan. (Shalahuddin, dkk, 2021). Rekomendasi mempunyai enam kriteria Kriteria utama, beberapa tipe pilihan rasional yang dapat diletakan sebagai kriteria yang digunakan untuk memecahkan masalah kebijakan Dunn.

a. Efektifitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakan tindakan. Pada tahap ini peneliti melihat bahwa tata kelola barang daerah menggunakan aplikasi SIMBADA cukup efektif. Hal ini dikarenakan aplikasi tersebut sudah mencakup banyak hal diantaranya pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran. Kemudian dalam hal efektifitas waktu keberadaan SIMBADA sangat meringkas waktu untuk kegiatan

- pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran
- b. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Dalam hal efisiensi peneliti melihat bahwa keberadaan SIMBADA sangat memberikan dampak positif dalam transparansi pelaporan transparansi barang.
- c. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Peneliti melihat bahwa keberadaan aplikasi SIMBADA sudah cukup untuk dijalankan namun masih perlu pengembangan dalam perbaikan kualitas SIMBADA. Hal ini dinyatakan oleh operator aplikasi selaku narasumber.
- d. Perataan, berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan.
- e. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, referensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Peneliti melihat bahwa respon yang diberikan terhadap keberadaan SIMBADA sangat mendukung dikarenakan membantu dalam pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran barang.
- f. Kelayakan, berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat. Peneliti melihat bahwa aspek kelayakan aplikasi SIMBADA layak untuk dikembangkan dalam hal kecepatan server untuk menginput data.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut :

Aplikasi SIMBADA Administrasi Pergudangan adalah sebuah sistem administrasi pergudangan untuk mencatat proses penerimaan barang, proses penyaluran/pengeluaran barang, perhitungan stok barang, dan menampilkan laporan-laporan yang dibutuhkan sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

Aplikasi SIMBADA telah terhubung mulai dari kegiatan penganggaran, kegiatan penatausahaan keuangan daerah, sampai kegiatan pencatatan dan pelaporan. Atas dasar tersebut, penerapan sistem berbasis komputer, memerlukan satu pihak sebagai administrator yang akan menjalankan database, aplikasi (software) dan hardware.

- a. Efektifitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakan tindakan. Pada tahap ini peneliti melihat bahwa tata kelola barang daerah menggunakan aplikasi SIMBADA cukup efektif. Hal ini dikarenakan aplikasi tersebut sudah mencakup banyak hal diantaranya pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran. Kemudian dalam hal efektifitas waktu keberadaan SIMBADA sangat meringkas waktu untuk kegiatan pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran
- b. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki. Dalam hal efisiensi peneliti melihat bahwa keberadaan SIMBADA sangat memberikan dampak positif dalam transparansi pelaporan transparansi barang.
- c. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Peneliti melihat bahwa keberadaan aplikasi SIMBADA sudah cukup untuk dijalankan namun masih perlu pengembangan dalam perbaikan kualitas SIMBADA. Hal ini dinyatakan oleh operator aplikasi selaku narasumber.
- d. Perataan, berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat kebijakan.
- e. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, referensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Peneliti melihat bahwa respon yang diberikan terhadap keberadaan SIMBADA sangat mendukung

dikarenakan membantu dalam pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran barang.

- f. Kelayakan, berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat. Peneliti melihat bahwa aspek kelayakan aplikasi SIMBADA layak untuk dikembangkan dalam hal kecepatan server untuk menginput data.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan manajemen pengelolaan yang lebih modern dalam peremajaan aplikasi. Hal dimaksudkan yaitu adanya peningkatan kualitas sistem software dalam mendukung kegiatan administrasi pengelolaan barang.
2. Peneliti berharap adanya penambahan sumber daya manusia yang berkompeten dalam penggunaan aplikasi. Sumber daya yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yaitu operator khusus yang menguasai aplikasi SIMBADA.
3. Perlu mengadakan pelatihan mengenai penggunaan aplikasi SIMBADA dalam jumlah banyak. Hal ini untuk kemungkinan regenerasi di kemudian hari.
4. Peneliti kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam mendukung berjalannya kegiatan administrasi pengelolaan barang menggunakan aplikasi SIMBADA.

REFERENSI

- Akib, Haedar, (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010
- Anton, Sujarwo. (2012). Kebijakan Publik Dalam Pelaksanaan Penataan Pola Pedangan Kaki Lima di Kota Malang. Jurnal Reformasi, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni.
- Diskon Silitonga, 2018, Valuasi Implementasi Kebijakan Publik(Studi Kasus: Evaluasi Implementasi Kebijakan Un Sd Di Kota Madya Jakarta Pusat Jurnal Institut Bisnis

- Nusantara Volume 21 Nomor 2
- Dunn, William N., 2004, Public Policy Analysis: An Introduction, Second Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall
- Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press
- Hasnadi. (2019). “Perencanaan Sumber Daya Manusia Pendidikan”. Bidayah: Studi Ilmu- Ilmu Keislaman. 10(2).
- Haudi. (2022). “Manajemen Kepemimpinan Pendidikan di Sekolah”. Jurnal: Ikraith-Humaniora. 6(1).
- Hasnadi. (2021). “The Importance of Supervision Implementation in Educational Institution”. Jurnal Dedikasi Pendidikan. 5(1).
- Haryono S, Aslamiah, B. S., & Rozikin, M. (2014). Model Partnership Sebagai Upaya Strategis Peningkatan Pelayanan Air Bersih (Studi terhadap Public Private Partnership di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik). Jurnal Administrasi Publik, 2(1), 89–94
- Insan Parid Apep. 2003. Respon pedagang Kaki ima Terhadap Implementasi Kebijakan Penertiban (Studi Kasus terhadap PKL di Jalan Merdeka Kota Bandung). UI: Jakarta Imron Ali. 2006. Kebijakan Pendidikan Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara
- Miftakhul Alfia Jannah. Irada Haira. (2021). “Karakteristik Kepemimpinan dalam Pendidikan di Indonesia”. ALSYS : Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan. 1(1).
- Muhtar. 2009. Orientasi Baru Supervisi Pendidikan, Jakarta: Gaung Persada Puspawati, A. A. (2016). Penerapan New Public Management (NPM) di Indonesia. Jurnal PUBLISIA, 1(1), 38–53.
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (2005). The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis. Policy Studies Journal, 8, 538–560
- Stufflebeam, Daniel L., George F Madaus and Thomas Kellaghan, Evaluation Models: Educational and Human Service Evaluation, Second Edition, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow: Kluwer Academic Publishers, 2000
- Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern, Nurul Fika, Anis Fauzi, Ahmad Qurtubi 16747
- Suratman. (2017). Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In CAPIYA Publishing (1st ed.). Capiya Publishing.
- Shalahuddin. Putri Anggun. Mufidah. (2021). Kepemimpinan Pendidikan Islam. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia. 1(7). 88
- Suaeb. Syarif. Agussalim. Muhammad Iqbal. (2021). Manajemen Kepemimpinan Pendidikan: Analisis Untuk Mewujudkan Keunggulan Kompetitif. Jurnal Ilmiah Mandala Education. 7(3).
- Syifa Fanisa Nabila. Inul Husna. Nuzul Habdi. (2020). “Hubungan Kepemimpinan dengan Lembaga Pendidikan”. PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. 2(1).
- T. A. Mccarley. Peters. M. L.. & Decman. J. M.. (2014). “Transformational Leadership Related To School Climate: A Multi-Level Analysis”. Educational Management Administration & Leadership. 11(3).